



# JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

Volume : Nomor: Tahun 2018 Halaman  
<http://www.fisipundip.ac.id>

---

## STRATEGI KETERPILIHAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PDI-PERJUANGAN PADA PEMILU KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**Muhamad Aji Masruri, Drs. Fitriyah, MA**

### *ABSTRACT*

*This study aims to find out how the electability strategy of PDI-Perjuangan female legislative candidates Temanggung Regency in the 2014 legal election. Women's representation through a 30% policy in legislative institutions is regulated in the Law. Regarding the quota regulates party management and legislative nomination. The party is required to comply with these rules in order to become participants in the Legal General Election. In addition, the party is also required to be able to nominate the best cadres in order to be able to compete with other candidates. The party has the right to choose the people who will be nominated in order to boost the party's vote. In addition to parties that compete in elections, each candidate certainly also competes with other candidates to be able to get support from the community including female candidates. The purpose of this study was to determine the electability strategy of prospective members of the PDI-Perjuangan women's legislation in Temanggung Regency in the 2014 Election in Temanggung Regency considering the party's vote acquisition was consistent from the 2009 Elections and 2014 Elections.*

*The theory used in this research is political marketing theory, used to determine the strategies of each selected female candidate. In Political Marketing theory there are 4 aspects, namely Product, Promotion, Price, and Place. This research was conducted with qualitative research methods. Data collection through in-depth interviews with members of the DPRD of the Temanggung Regency women from the PDI-Perjuangan Faction and documentation in the field. The results of the study show that each candidate has his own strategy, through political party machines, candidate figures, successful team machines, and network machines.*

**Keywords: Evaluation, Selection, Apparatus**

## 1. PENDAHULUAN

Pada masa kini, keterlibatan perempuan dalam urusan politik sangat berbeda dengan kondisi perempuan di masa lalu yang berjuang secara sembunyi-sembunyi. Perbedaan itu terjadi karena kondisi sosio-kultur maupun perkembangan zaman, dimana pada masa sekarang perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam turut serta membangun negara. Salah satu contohnya dapat dilihat di dalam parlemen, dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Namun, jumlah kaum perempuan di parlemen sangat sedikit dibandingkan dengan kaum pria atau biasa disebut dengan politik-maskulinitas. Di seluruh dunia, kaum perempuan hanya menempati 14,3 persen dari total anggota parlemen yang ada<sup>1</sup>. Dari data lembaga legislatif di tingkat pusat, perempuan hanya 8,8% (44 orang dari 500 anggota DPR RI), sementara 11%

perempuan menduduki jabatan sebagai pemimpin partai politik<sup>2</sup>. Sesungguhnya jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, tanggal 17 Agustus 1945, dalam pasal 27 ayat 1, yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Hal tersebut senada dengan ketentuan dalam konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan, yaitu:<sup>3</sup>

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi;
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat

---

<sup>1</sup> Women in Parliament: 2002. Beyond Numbers. Hal. 12

<sup>2</sup> Women and Politics Compilation of Reference: NDI. 2001

<sup>3</sup> Romany Sihite. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal.156

yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi;

3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.

Kedudukan perempuan di dalam parlemen tidak kalah pentingnya dengan pria karena di dalam parlemen, perempuan dapat mewakili suara-suara dan masalah-masalah perempuan yang berguna bagi kemajuan bangsa dan Negara. Tetapi sampai saat ini perempuan masih belum banyak diberi kesempatan yang lebih untuk merubah kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Untuk dapat terlibat dalam segala aspek kegiatan politik bagi perempuan tidaklah mudah. Kondisi perempuan Indonesia seperti sekarang ini terbentuk oleh adanya kendala yang menghambat partisipasi politiknya.

Kendala pokok yang sering sekali dipergunakan sebagai alasan lemahnya partisipasi politik perempuan yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal.

Pertama, faktor internal dari kaum perempuan itu sendiri. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri perempuan sendiri yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh pada tingkat partisipasi perempuan dalam politik, terdiri atas:<sup>4</sup>

1. Adanya anggapan di kalangan perempuan bahwa politik itu penuh kekerasan sehingga dipandang sebagai dunianya laki-laki, sehingga perempuan enggan berkecimpung di dalamnya;
2. Banyak perempuan tidak senang berorganisasi;
3. Perempuan kurang memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya bahkan perempuan sendiri kadang-kadang

---

<sup>4</sup> Siti Hariti, Satriyani. 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hal.203

menenggelamkan dirinya dalam dunia domestik sibuk dalam rumah tangga; dan

4. Perempuan sering kurang percaya diri, sehingga tidak siap mental dan psikologis untuk memasuki dan melaksanakan fungsi-fungsi jabatan sebagai perumus kebijakan maupun pengambil keputusan.

Kedua, adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri perempuan sendiri. Berdasarkan pengamatan secara faktual, terlihat bahwa perempuan masih lebih banyak menjadi objek ketimbang menjadi subjek dalam segala hal. Ini disebabkan oleh banyak faktor yang salah satunya berasal dari budaya patriarki yang telah berhasil mengerdilkan jiwa dan mengikis kepercayaan diri kaum perempuan. Kesan bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki masih melekat. Kesan ini berkembang karena *image* yang mungkin tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik, bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik dan semacamnya. Faktor lain yang

dinilai menjadi kendala seorang perempuan untuk terjun langsung ke politik dan turut aktif dalam pengambilan keputusan adalah sumber dana. Sebagai contoh, dalam fenomena pemilihan calon legislatif, sudah merupakan konsumsi publik bahwa untuk dapat melenggang ke parlemen membutuhkan “mahar” politik yang sangat besar. Seorang calon legislatif (caleg) mau tidak mau wajib merebut hati konstituennya melalui strategi *marketing* politik dengan biaya yang tidak murah.<sup>5</sup> Dapat dilihat bahwa yang menjadi persoalan adalah bahwa proses demokratisasi yang dilakukan oleh negara Indonesia masih belum memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan perempuan terutama di bidang politik.

Keterlibatan perempuan 30% dalam keterwakilan tersebut dimulai dari partai politik terlebih dahulu dimana setiap partai melibatkan perempuan minimal 30% dalam kepengurusannya. Pada dasarnya, menjadi pengurus sebuah partai merupakan proses awal sebelum

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal.203

terjun dalam dunia politik yang sebenarnya. Ketika perempuan terlibat dalam kepengurusan partai politik maka secara tidak langsung mendapatkan pendidikan politik sehingga ketika mencalonkan sebagai anggota legislatif, perempuan-perempuan tersebut dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui pengalaman yang sudah didapatkan ketika menjadi pengurus partai politik. Fakta yang terjadi pada partai di tingkat nasional adalah perempuan-perempuan yang maju dalam pemilu legislatif justru orang-orang yang sebelumnya belum pernah terlibat dalam kepengurusan partai politik, sehingga banyak dari perempuan tersebut tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif. Terlebih apabila perempuan yang dicalonkan oleh partai sebelumnya berprofesi sebagai publik figur, maka bukan tidak mungkin tujuan partai tersebut hanya ingin memperoleh suara melalui popularitas tanpa memperhatikan apakah calon tersebut bisa bekerja dan mengabdikan kepada partainya. Upaya untuk menyetarakan gender sudah diatur dalam Undang-

undang nomor 8 tahun 2012 pasal 55 yaitu “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.”

Penelitian ini akan menjawab bagaimana keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Temanggung pada pemilu 2014-2019 pada pemberlakuan kuota 30% dalam pencalonan anggota legislatif sebagaimana yang sudah diamanatkan UU No. 10 Tahun 2008 dan bagaimana strategi calon anggota legislatif perempuan PDIP dalam keterpilihannya pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Temanggung. Penulis memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan diteliti. Yang mana partai tersebut merupakan partai pemenang pemilu legislatif di Kabupaten Temanggung periode 2014 – 2019.

## **2. METODE PENELITIAN**

Desain penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa

yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus.<sup>7</sup>

Adapun alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena dalam penelitian ini

data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar. Selain itu semua data yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.<sup>8</sup> Penelitian kualitatif menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dibandingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sumber data.

---

<sup>6</sup>Haris Herdiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. Hal 9

<sup>7</sup>Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana. Hal 68

<sup>8</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2009, cet. 26 Hal: 11

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesta demokrasi 5 tahunan terselenggara pada hari Rabu, 9 April 2014. Di tahun tersebut terdapat 12 partai nasional yang terdaftar sebagai peserta Pemilu. Pemilu tersebut untuk memilih DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Tidak hanya Pemilu Legislatif, di tahun 2014 juga digelar pesta demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil presiden untuk periode 5 tahun ke depan. Artinya, tahun 2014 merupakan tahun politik dimana masing-masing partai tentunya mempunyai strategi untuk bisa menjadi pemenang dalam pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Masyarakat juga dituntut untuk lebih cermat dan melek terhadap politik agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak berkepentingan sehingga bisa merugikan bagi masyarakat itu sendiri.

Pada Pemilu tahun 2014 di Kabupaten Temanggung, kuota 30% perempuan juga diatur dalam kepengurusan partai politik. Dengan begitu, tingkat kesadaran dari masyarakat Kabupaten Temanggung dapat dikatakan cukup tinggi, dimana masyarakat terutama kaum perempuan cukup antusias untuk dapat terlibat tidak hanya dalam kepengurusan partai namun juga dalam

pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2014. Pada pemilu 2014 di Kabupaten Temanggung, perolehan suara terbanyak dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan memperoleh suara terbanyak pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 di Temanggung, yakni dengan 84.763 suara untuk DPRD Kabupaten. Terbanyak kedua diraih oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 68.029 suara. Terbanyak ketiga diperoleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 65.553 suara, dan terbanyak keempat didapat Partai Amanat Nasional (PAN), yakni dengan 51.156 suara. Selanjutnya, terbanyak kelima diperoleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 47.956 suara dan terbanyak keenam adalah Partai Gerindra dengan 44.934 suara. Di bawahnya, berturut-turut diraih Partai Nasdem dengan 29.953 suara. Partai Hanura dengan 27.115 suara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 26.143 suara. Partai Demokrat dengan 18.120 suara. Partai Keadilan dan Perubahan Indonesia (PKPI) mendapat 3.455 suara, dan Partai Bulan Bintang (PBB) dengan 1.424 suara.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> KPU Kabupaten Temanggung

Pemilu dijadikan momentum untuk bisa mempersatukan masyarakat. Jangan sampai hanya karena perbedaan dukungan maupun perbedaan partai akhirnya masyarakat terpecah belah. Peran masing-masing calon dan tim pemenangan juga sangat diperlukan, jangan sampai hanya karena Pemilu masyarakat dijadikan korban perpecahan. Selain masyarakat, hubungan antar calon juga tetap terjaga. Jangan sampai persaingan pada saat pemilu dijadikan ajang untuk bersaing dan bermusuhan antar calon. Bagi calon yang terpilih, semua janji-janji politik yang dijanjikan pada saat kampanye harus direalisasikan karena hal tersebut adalah kewajiban yang dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang disampaikan pada saat kampanye.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Keterwakilan perempuan melalui kebijakan 30% pada lembaga legislatif sudah diatur dalam Undang-undang. Berkaitan dengan kuota tersebut mengatur tentang kepengurusan partai dan juga pencalonan legislatif. Partai dituntut untuk mematuhi aturan tersebut agar bisa menjadi peserta Pemilu. Selain itu, partai juga dituntut untuk bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya agar mampu bersaing dengan calon lain. Partai berhak untuk memilih orang-orang yang akan dicalonkannya agar

dapat mendongkrak perolehan suara partai. Selain partai yang bersaing dalam Pemilu, masing-masing calon tentunya juga bersaing dengan calon lainnya untuk bisa mendapat dukungan dari masyarakat termasuk calon perempuan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi keterpilihan calon anggota legislatif perempuan PDI-Perjuangan Kabupaten Temanggung pada Pemilu 2014 di Kabupaten Temanggung mengingat perolehan suara partai tersebut konsisten dari Pemilu 2009 dan Pemilu 2014.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Marketing politik, digunakan untuk mengetahui strategi masing-masing calon perempuan terpilih. Dalam teori Marketing Politik ada 4 aspek yaitu Produk, Promosi, Harga, dan Tempat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada anggota DPRD Perempuan Kabupaten Temanggung dari Fraksi PDI-Perjuangan serta dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan setiap calon mempunyai strategi tersendiri, yaitu melalui mesin partai politik, figur calon, mesin tim sukses, dan mesin jaringan. Penelitian ini menyimpulkan setiap caleg perlu mengoptimalkan kekuatan strateginya.

### **Saran**



Sebagai organisasi politik, partai diharapkan mampu melaksanakan fungsi yang sudah ditetapkan mulai dari komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, serta pengatur konflik. Partai diharapkan dapat menjadi penggerak pelaksanaan Pemilu yang lebih baik serta meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilu. Setiap calon diharapkan dapat menjadi agen perubahan pada setiap penyelenggaraan Pemilu.

Setiap calon meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu termasuk meminimalisir terjadinya *money politic* dan isu SARA.

Pemerintah sudah mengalokasikan 30% keterwakilan perempuan dalam politik dimulai dari struktural partai hingga pencalonan legislatif sehingga masyarakat memiliki banyak ruang untuk bisa berkontribusi dalam dunia politik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Allison, Michael dan Jude Keye. -. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana

Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

Firmanzah. 2003. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*.

Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Goodwin Guy S,-Gill. 1999. *PEMILU JURDIL : Pengalaman dan Standart Internasional*. Diterjemahkan Oleh Nurhasan. Jakarta: PIRAC-The Asia Foundation Cetakan 1

H. I, A. Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesai*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika

Marijan, Kacung. 2006. *Demokratisasi Di Daerah (Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung)*. Surabaya : Eureka dan PusDeHAM

Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Strategi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press

Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi memenangkan pemilu, sebuah pendekatan baru kampanye pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Prandhawarti, Ari dan Tri Cahyo Utomo. 2008. *Pemilu dan Demokrasi*. Semarang: FISIP Undip cetakan 1

Pratikno. 2008. *Manajemen Jaringan dalam Perspektif Strukturasi*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi publik. Magister Adminitrasi Publik Universitas Gajah Mada.

Sayuti, Salatun Dalula. 2014. *Komunikasi Pemasaran Politik*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Siti Hariti, Satriyani. 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sri Suwitri. 2008. *Jejaring Kebijakan dalam Perumusan Kebijakan Publik Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir*

dan Rob Kota Semarang. Semarang: badan Penerbit Universitas Diponegoro Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media

Syafiie, Inu Kencana dan Azhari. 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama

**Jurnal:**

Firmanda A, M. Aries. 2017. “*Kerjasama Pemerintah Kota Pekalongan dengan Juru Parkir dalam Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2013-2015*”. FISIP, Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro Semarang.

Fitriyah, Supratiwi. 2015. “*The Electability of Women Candidates in The Legal Election of Central Java DPRD in 2014*” *Jurnal Komunitas* v6i2.3306

Karram, Azza. 2001. “*Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan*

dan Pemberdayaan”. Stockholm Sweden: International IDEA  
Marbun, BN. 2003. “*Kamus Politik*”. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

**Website:**

<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm88fded9e71full.pdf>.

Diakses pada 18 September 2017 Pukul 20:00 WIB

<http://kpu-jatengprov.go.id/> diakses pada 20 Juni 2017 Pukul 20:00 WIB

[www.businessofgovernment.org](http://www.businessofgovernment.org) diakses pada 26 September 2017 Pukul 21:00WIB

**Lainnya:**

KPU Kabupaten Temanggung  
Pasal 1 ayat 2 UU No.8 Tahun 2012  
Tentang Pemilu Legislatif

UU No.8 Tahun 2012

Women and Politics Compilation of Reference: NDI. 2001